

B A B I

P E N D A H U L U A N

Menjelang akhir abad ke-15 arus penjajahan Barat ke Timur sangat deras, terutama penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Nafsu untuk mendapat rizki yang banyak dengan cara yang amat licik, telah mendorong orang-orang Eropa berlomba-lomba ke Benua Asia, terutama setelah Columbus menemukan Benua Amerika dan Vasco da Gama menginjak kakinya di India. Di antara bangsa Eropa yang saat itu sangat haus tanah jajahan, yaitu Portugis dan Belanda, di mana setelah mereka menguasai Goa di India, maka upaya penaklukannya diarahkan ke Malaka dan Kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di pantai utara Sumatera: Aru, Pidie, Perlak, Pase, Aceh, Teumieng dan Daya.¹

Untuk mencapai tujuan itu, dari Malaka yang telah dikuasainya, Portugis mengatur siasat tahap demi tahap. Langkah yang diambilnya yaitu mengirim kaki tangan-kaki tangannya ke daerah-daerah pesisir utara Sumatera untuk menimbulkan kekacauan dan perpecahan dalam negeri yang akan dikuasainya itu, kalau mungkin perang saudara, seperti yang terjadi di Pase, sehingga ada pihak-pihak yang meminta bantuan kepada mereka, hal ini menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan intervensi.

¹ A. Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, halaman 13.

Karena Aceh terletak di bagian paling utara pulau Sumatera dan paling barat bagi kepulauan Nusantara, berikut berpuluh-puluh pulau besar dan kecil yang mendampinginya, wilayah itu kini daerah Istimewa propinsi Tingkat I Negara Republik Indonesia dan jika dilihat dari letaknya, Aceh dibagian barat wilayahnya memiliki dua muka laut (Samudera India dan Selat Malaka) dapatlah diperhitungkan bahwa wilayah ini tempat singgah permulaan kegiatan pelayaran dan merupakan pintu masuk perlintasan laut dari Barat ke Timur.

Pada mula pertumbuhan Kerajaan Aceh lokasinya di ujung utara pulau Sumatera yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar, yang dalam bahasa Aceh disebut Aceh Rayeuk, Aceh Lheesage (Aceh Tiga Sagi), Aceh Inti (Aceh Proper), disebut demikian karena daerah itulah pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan disitulah ibukota kerajaan, yang bernama Bandar Aceh atau secara lengkapnya Bandar Aceh Darussalam.²

Di bawah Sultan yang pertama (Ali Mughayat Syah), Aceh berhasil membeberken dari kekuasaan Pedir dan kemudian menyatukan kegiatan di sekitarnya, hal ini dilakukan untuk menyatukan kegiatan perdagangan dengan memusatkan di pelabuhan saja, karena sebelumnya kegiatan perdagangan di

²⁾ Tim penulis Muhammad Ibrahim, M. Arifin, Nasrudin Sulaiman, dkk, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Dep. P dan K, Jakarta, 1991, halaman 70.

kawasan itu berada di pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya, yaitu Daya, Pedir dan Samudera (Pase). Dengan demikian di bawah sultannya yang pertama, Kerajaan Aceh telah mendapatkan seorang pemimpin tangguh yang berhasil meletakkan dasar bagi perkembangan Kerajaan Aceh untuk pertama kali.

Sultan lain yang besar jasanya dalam membina Kerajaan Aceh ialah Alauddin Riayat Syah atau lebih terkenal setelah ia meninggal dengan sebutan Al-Kahhar. Ia memerintah sejak tahun 1563-1571 M.³ Di bawah sultan ini Kerajaan Aceh mulai melakukan perluasan kekuasaan yang ditujukan agar dapat memonopoli perdagangan di sana, terutama perdagangan lada. Selain ke pantai barat, pantai bagian timur Sumatera juga menjadi sasaran ekspansi Aceh. Kerajaan Aru yang sering berhubungan dengan Portugis di Malaka ditaklukkannya pada tahun 1539. Anak Sultan Al-Kahhar yang bernama Abdullah di angkat sebagai Sultan di sana.

Puncak perkembangan Kerajaan Aceh terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1637 M), masa ini merupakan masa kejayaan Kerajaan Aceh, baik politis maupun ekonomis, ekspansi-ekspansi teritorial ke daerah-daerah tetangganya seperti yang pernah dilakukan pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahhar diulangi kembali. Ia telah berhasil menaklukkan sejumlah kerajaan di sekitar Selat Mlaka dan di pantai barat pulau Sumatera. ⁴

³) Ibid, halaman 71.

⁴) Ibid, halaman 72-73.

Anthony Reid seorang sarjana dan Guru besar bangsa Australia yang pernah mengajar sejarah pada Malayan University di Kuala Lumpur, melukiskan Aceh di zaman Iskandar Muda "Di bawah pimpinan raja yang gagah berani dan brilian Sultan Iskandar Muda (1607-1636), kekuatan dan kebesaran Aceh, baik di dalam atau di luar negeri, telah mencapai puncaknya. Pengawasan kerajaan berjalan efektif sekali terhadap pelabuhan-pelabuhan penting di sepanjang pantai barat Sumatera seperti halnya di pantai timur sampai ke Selatan Asahan. Perjalanan pelayannya mencapai sejauh Pahang di pantai Semenanjung Melayu, sementara perdagangan luar negerinya telah mampu merealisasikan segala cita-citanya, sedangkan Istana yang besar dan Agung adalah pusat kegiatan ilmu dan keserjanaan yang tidak ada bandingnya di pulau Sumatera" ⁵

Menurut "Bustanul-s-Salatin" Iskandar Muda mangkat pada hari Sabtu waktu lohor di tahun 1046. Dan dicatat oleh Nuruddin pada hari itu juga tanggal 29 Rajab Sultan Bungsu (Husin Syah) naik tahta dengan gelar Iskandar Thani Ala'uddin Mughayat Syah. Iskandar Thani di atas tahta hanya sebentar, yakni lebih kurang 5 tahun.

"Bustanu's-Salatin" mengatakan bahwa sultan ini alim dan adil. Banyak hukum agama di perintahkan supaya dipatuhi dan dijalankan dengan baik, dan yang bid'ah serta

⁵) A. Hasjmy, Iskandar Muda Meukuta Alam, Bulan Bintang, Jakarta, halaman 53-54.

haram dilarang. Prof. Veth menekankan bahwa dengan tandasnya hukum-hukum Islam dijalankan oleh Raja Aceh, Kerajaan Islam pertama di Indonesia.⁶

Di zaman pemerintahan Iskandar Thani, Aceh dan Semenanjung Melayu telah melalui satu zaman yang berbeda dari yang pernah dialami sejak Iskandar Muda berkuasa. Secara khusus, Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Iskandar Tsani tidak lagi mengikuti satu dasar luar yang militan. Sebagai seorang yang wara Iskandar Thani menumpukan perhatiannya ke arah pembangunan masyarakat memperkembangkan pendidikan Islam.⁷

Pada 15 H, Februari 1641, lebih kurang sebulan sesudah tamatnya kekuasaan Portugis di Malaka, Iskandar Tsani mangkat, sejak itu nasib Kerajaan Aceh dan rakyatnya langsung berubah. Secara khusus pemerintahan Aceh tidak lagi merupakan suatu kerajaan yang benar-benar disegani, melainkan di daerah inti dan Daerah pokok (Pidie, Perlak, Samudera Pase dan lain-lainnya). Pemerintahan Ratu berjalan 59 tahun, bermula dari balu (Janda) Iskandar Thani, yang bergelar Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641 - 1675), mengakibatkan kekuasaan Aceh kian menurun dalam politik, ekonomi, dan militer, tetapi masih berkembang dan meningkat dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan dan senibuda-

⁶) H. Muhammad Said, Aceh Sepanjang Abad, PT. Percetakan dan Penerbitan Waspada Medan, Cet. II, halaman 346.

⁷) Prof. A. Hasjmy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, PT. Al-Ma'arif, 1981, halaman 246.

6
ya.⁸

Dalam sejarah tercatat bahwa Aceh merdeka pernah 59 tahun di bawah Perintahan Ratu, yang sekalipun semenjak pemerintahan para ratu kebesaran Aceh mulai menurun, namun selama masa itu Kerajaan Aceh Darussalam masih cukup teratur.

Dalam menilai Ratu Tajul Alam Safiatuddin, Muhammad Said menulis: "Tajul Alam adalah seorang negarawan, sama sekali bukan seorang militer". Sayang tentang kebijaksananya belum pernah luas menjadi perhatian, mungkin karena ia seorang wanita dan mungkin pula karena kebesaran ayahnya tidak berhasil dicapainya kembali. Apalagi kalau kita menyadari akan prestasi gemilang yang telah dicapainya, seperti yang kemudian dilukiskan H. Muhammad Said:

"Sungguhpun demikian, sebagai wanita prestasi yang telah dicapainya sebagai Ratu adalah cukup besar, kecuali Ratu Elizabeth dari Inggris di sekitar zaman itu, tidaklah terdengar peranan seorang raja perempuan yang sedemikian mengagumkan seperti Tajul Alam ini". (9)

Kerajaan Aceh Darussalam telah mengambil Islam menjadi dasar negaranya, dan telah sanggup membangun tamaddun dan kebudayaan yang tinggi dikawasan kepulauan Nusantara, terutama Sumatera.¹⁰

8) Ibid, halaman 246.

9) H. Muhammad Said, op. cit, halaman 378-379.

10) A. Hasjmy, op. cit, halaman 20.

A. Alasan Memilih Judul

Yang menjadi dorongan dipilihnya judul ini adalah:

1. Untuk memperkenalkan peranan tokoh wanita Aceh, yakni Sultanah Safiatuddin yang kurang mendapat perhatian luas dari para ahli sejarah.
2. Untuk memperkenalkan peranan wanita Aceh yakni Sultanah Safiatuddin dalam mengendalikan pada pemerintahan di wilayah yang terkenal fanatik dalam berpegang pada agama Islam.
3. Sebagai bahan bandingan dan menambah pembendaharaan sejarah Indonesia, khususnya tokoh wanita yang kemampuannya cukup mengagumkan padahal saat itu Portugis, Belanda atau VOC sudah kuat menanamkan kukunya di Indonesia.

B. Penegasan Judul

Agar tidak terdapat kesalahpahaman dan mendapat pengertian yang jelas terhadap skripsi ini, yaitu: "Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin dan Peranannya dalam Pemerintahannya di Aceh Darussalam Tahun 1641-1675 M, maka terlebih dahulu dikemukakan penjelasan dalam konteks judul tersebut, adapun istilah yang di maksud antara lain:

Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin:

Adalah permaisuri Iskandar Thani, ia adalah seorang negarawan, sama sekali bukan seorang militer. Putri ini telah dinobatkan pada hari itu ju-

ga ketika suaminya meninggal. Gelar selengkapnya adalah "Paduka Sri Sultan Taj'al Alam Tsafiatuddin Syah Berdaulat Zillu 'lahi Fi'l 'Alam binti's Sultan Raja Iskandar Muda Johan Berdaulat."¹¹

H. M. Zainuddin dalam bukunya yang bernama "Srikandi Aceh", menilai Safiatuddin sebagai seorang wanita yang gemar kepada kesusasteraan dan karang mengarang, di mana antara lain beliau menulis:

"... seorang puteri yang cerdas dan bijaksana, gemar sekali kepada sajak (syair) dan mengarang guru besar sajaknya Hamzah Fansury dan guru dalam ilmu fiqh Nuruddin ar-Raniry. Selagi masih belum dewasa sampai menjadi permaisuri, banyak mengeluarkan belanja untuk membantu Hamzah Fansuri buat membangun kesusasteraan. Karena itu, namanya sangat populer dalam kesusasteraan, dan juga banyak membantu belanja kepada Abdul Rauf untuk mengarang kitab-kitab hukum. Kedua pengarang ini di kirim ke luar Aceh untuk meluaskan pemandagangan dan memperdalam ilmunya, yaitu ke Malaya, India, Kudus, Bagdad, Madinah dan Mekkah" (12)

Pemerintahan Aceh Darussalam:

Adalah sebuah pemerintahan yang segala urusannya dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara Aceh Darussalam, Aceh terletak dibagian paling utara pulau Sumatera dan paling barat bagi kepulauan Nusantara. Berikut berpuluh-puluh pulau besar dan kecil yang mendampinginya, wilayah itu kini daerah istimewa propinsi Tingkat I Negara

¹¹⁾ Ibid, halaman 377.

¹²⁾ A. Hasjmy, op. cit, hal. 51.

9

Republik Indonesia.¹³ Dan inti Kerajaan Aceh terletak di ibukota kerajaannya yang bernama Bandar Aceh Dar-as Salam. Di ibukota ini mengalir sebuah sungai yang bernama Krueng Aceh (Kali Aceh), sungai ini menghubungkan ibukota dengan pelabuhan yang terletak di ~~mpara~~ sejauh lebih kurang 31 Km.¹⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud skripsi ini adalah suatu pemerintahan di Aceh Darussalam yang dikendalikan oleh seorang tokoh wanita yang bernama Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin, di mana beliau dalam mengatur roda pemerintahan di Aceh pada tahun 1641-1675 M sangat mengagumkan, padahal saat itu Portugis dan Belanda sudah bercokol di Indonesia.

C. Lingkup Bahasan dan Rumusan Masalah

1. Lingkup Bahasan

Sesuai dengan judul di atas lingkup bahasan skripsi ini adalah sekilas tentang Kesultanan Aceh Darussalam yaitu masa perkembangan Aceh Darussalam dari masa berdirinya sampai pada masa Sri Ratu Safiatuddin tahun 1641-1675 M, mengenai Aceh sesudah itu tidaklah menjadi pembahasan penulis.

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan lingkup bahasan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah:

¹³) H. Muhammad Said, op.cit, halaman 1.

¹⁴) Muhammad Ibrahim, dkk, op.cit, hal. 70.

- a. Bagaimana keadaan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa berdirinya dan masa perkembangannya.
- b. Bagaimana Keadaan Aceh Darussalam pada masa Pemerintahan Ratu Safiatuddin.
- c. Sejauhmana usaha Ratu Safiatuddin dalam memegang pemerintahan di Aceh Darussalam yang pada saat itu Portugis sudah bercokol di Indonesia.

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengungkapkan kembali sejauhmana perkembangan Aceh Darussalam dan bagaimanakah peranan Ratu Safiatuddin dalam mengendalikan pemerintahan, yang pada saat itu Portugis dan Belanda atau VOC sudah mengambil bagian di Sumatera.

E. Methode Penulisan

1. Heuristik : Yaitu pengumpulan dari data sumbernya.¹⁵ maksudnya kegiatan mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini dari sumbernya. Sedangkan sumber datanya menggunakan sumber kepustakaan, yaitu data yang diambil dari buku-buku literatur.
2. Kritik : Yaitu kegiatan untuk menilai data-data yang telah diperoleh dengan tujuan agar mendapat data yang otentik (kritik eks-

teren) dan data yang kribilitasnya dapat dipertanggung jawabkan (kritik Interen).¹⁵ agar memperoleh fakta yang dapat mengantarkan kepada kebenaran ilmiah.

3. Interpretasi : Yaitu kegiatan untuk menetapkan atau memberikan makna yang saling herhubungan dari fakta yang telah diperoleh.¹⁶

4. Historiografi : Yaitu langkah untuk menyajikan hasil pemafsiran (interpretasi) atas fakta sejarah dalam bentuk tulisan menjadi kisah.¹⁷ Adapun pola penyajiannya dengan cara sebagai berikut:

- a. Informasi diskriptif, yaitu menerangkan apa adanya dari hasil-hasil yang diperoleh.
- b. Analisa interpretatif, yaitu pola penyajiannya dengan menggunakan analisa untuk mencapai satu kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

untuk memudahkan pembahasan maka skripsi ini di bagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi

¹⁵⁾ Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, Yayasan Idayu, Jakarta, 1978, hal. 11.

¹⁶⁾ Ibid, halaman 38-40.

¹⁷⁾ Ibid, halaman 42.

beberapa bagian, adapun tata urutan pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- Dalam bab ini menjelaskan alasan pemilihan judul, yaitu yang mendorong dipilihnya judul ini,
- Kemudian dibahas tentang penegasan judul, agar tidak terjadi kekeliruan atau kekaburan dalam memahami judul yang sebenarnya.
- Selanjutnya untuk membatasi agar penulisan tidak keluar dari masalah, maka dijelaskan pula lingkup bahasan dan sekaligus rumusan masalah.
- Tujuan penulisan, memerangkan apa tujuan yang diinginkan atau dicapai sesuai dengan judul skripsi ini dibahasnya.
- Agar tujuan penulisan dapat dicapai dengan baik maka perlu menggunakan metode penulisan yang sesuai.
- Dan akhirnya untuk memudahkan penulisan dan pemahaman disusun sistematika penulisan.

Bab II : Yaitu Sejarah Singkat Kesultanan Aceh Darussalam
berisi tentang berdirinya kesultanan dan perkembangan Aceh Darussalam.

Bab III : Yaitu Aceh Darussalam dalam Pemerintahan Sri Ratu Safiatuddin tahun 1641-1675 M, berisi tentang kondisi pemerintahan sebelum Sri Ratu Safia-

tuddin, Pengangkatan Sri Ratu Safiatuddin sebagai Sultanah Aceh Darussalam, dan kondisinya memerintah dalam masa Ratu Safiatuddin.

Bab IV : Yaitu usaha Sri Ratu Safiatuddin dalam mengembangkan negara, berisi tentang meningkatkan kedudukan wanita, dan mempertahankan kemerdekaan Aceh Darussalam.

Bab V : Yaitu kesimpulan, berisi kesimpulan dari semua bahasan, saran dan penutup.